SULAWESI TENGAH



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

(0451) 421755

dpmd.sultenoft

dpmd.sultenoftprov.ofto.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025..... 8

8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra..... 32

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 40

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD..... 66

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 74

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 74

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 77

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 79

3.3 Program dan Kegiatan 111

BAB IV *RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....* 111

4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan..... 138

BAB V PENUTUP..... 138

5.1 Kaidah Pelaksanaan 140

5.2 Penutup.....

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhoNya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RKP 2025 dan RKPD 2025 yang berisi rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, atas dukungan dan partisipasinya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dapat terwujud. Semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan panduan kerja bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Palu, 19 November 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKATDAN DESAPROVINSI
SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 1986003 1 009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang maju, mandiri dan sejahtera, selanjutnya diatur kembali dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk itu, dalam menjalankan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Fungsi meliput :

a. Perumusan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;

e. Penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional tertentu, dan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Panjang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 "*Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan*" serta mendukung Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Kerja Perubahan sebagai bentuk pelaksanaan teknis urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Perubahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025- 2029 serta RKPD. Didasari hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tantang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 tahun 2024

tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulaesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045;
20. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk merumuskan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Rencana Strategis dan RKPD, sehingga lebih memantapkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Renja Perubahan menjadi acuan menyesuaikan anggaran pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Menambah program dan kegiatan, atau Memasukkan kegiatan baru yang relevan dengan perkembangan situasi.

c. Mengatasi masalah dan menyelaraskan dengan RKPD atau memastikan keselarasan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 .

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renja Perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No. 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyeleanggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program, dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Evaluasi sebagai salah satu metode yang berfungsi untuk peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui apakah kinerja utama dari Perangkat Daerah telah tercapai, termasuk didalamya meliputi program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yakni untuk mengetahui:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi/ memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

- Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 didukung oleh pendanaan yang digunakan secara efektif dan efisien. Adapun Realisasi Belanja Operasional dicapai tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.889.710.768 dari jumlah pagu total Rp. 27.425.704.598 dengan tingkat capaian 14.18%

Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Alokasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan DPPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 27.425.704.598 terdiri dari:

a) Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 9.625.343.861
b) Belanja Langsung Rp. 17.800.360.737

Rincian realisasi belanja 2025 diuraikan sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN blm
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12,070,013,597**	**3,666,193,301**	**30,37**
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**136,147,650**	**-**	**-**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,865,000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,675,000	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111,607,650	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10,733,370,661**	**3,478,225,681**	**32,41**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,625,343,861	3,083,687,181	32,04
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,061,700,000	394,538,500	37,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46,326,800	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**56,605,600**	**11,120,000**	**19,64**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	56,605,600	11,120,000	19,64
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**197,444,700**	**21,960,000**	**11,12**
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	32,960,000	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,050,000	-	-

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44,545,000	-	-
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	69,889,700	**21,960,000**	**31,42**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**321,205,400**	**25,432,500**	**7,92**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	77,826,300	-	-
	Penyediaan bahan logistik kantor	25,000,000	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218,379,100	25,432,500	11,65
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	Pengadaan mebel	-	-	-
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**288,351,568**	**35,405,120**	**12,28**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288,351,568	**35,405,120**	**12,28**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**336,888,000**	**94,050,000**	**27,92**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	149,350,000	-	-

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187,538,000	94,050,000	50,15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2	**Program Penataan Desa**			
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	**3,572,485,350**	**-**	**-**
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	46,191,650	-	-
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	3,526,293,700	-	-
3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**			
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	**135,315,450**	**-**	**-**
	Fasilitasi Kerjasama Desadengan Pihak Ketiga	30,573,450	-	-
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	59,828,100	-	-
	Fasilitasi Kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota	44,913,900	-	-
4	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**741,920,850**	**86,605,500**	**11,67**
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	45,139,900	42,819,900	94,86

	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	36,365,350	-	-
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	97,571,200	1,500,000	1,54
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	35,203,200	-	-
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	107,489,600	1,157,680	1,08
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	181,880,250	41,127,920	22,61
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	42,766,700	-	-
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	93,741,600	-	-
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa	24,713,250	-	-
	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	30,481,550	-	-
	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	46,568,250	-	-
5	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	**10,905,969,369**	**136,911,967**	**1,26**

	Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	185,323,960	-	-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	97,116,500	-	-
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9,672,874,100	31,637,047	0,33
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	65,289,900	-	-
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	142,412,625	-	-
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24,940,200	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	25,000,084	-	-
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	693,012,000	105,274,920	15,19

	Kesejahteraan Keluarga			
	TOTAL ANGGARAN	**27,425,704,598**	**3,889,710,768**	**14,18**

- Capaian Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian desa, presentase desa mandiri dalam indeks desa serta mendukung RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah terhadap "Menurunnya Tingkat Penduduk Miskin di perkotaan dan Perdesaan. Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2025	
				Target Indeks, %	Realisasi Indeks, %	Target Indeks,%	Realisasi Indeks, %
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa	0,7180	0,7285	72,47	99,98
2.		Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa	Presentase Desa Mandiri	12,595	15,147	23,78	20,95
3.			Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya	39,685	42,291	30,37	0,76

Perkembangan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

STATUS DESA BERDASARKAN IDM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017-2025										
No.	STATUS DESA	T A H U N								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	MANDIRI	0	1	2	12	19	42	132	279	386
2	MAJU	15	53	168	267	346	522	666	782	822
3	BERKEMBANG	526	696	1005	1096	1096	995	893	750	620
4	TERTINGGAL	1097	952	615	436	355	266	151	31	14
5	SANGAT TERTINGGAL	204	140	52	31	26	17	0	0	0
TOTAL		1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842	1842

PERSENTASE PERKEMBANGAN STATUS DESA BERDASARKAN IDM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017-2025										
No.	STATUS DESA	T A H U N								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	MANDIRI	0.000	0.054	0.109	0.651	1.031	2.280	7.166	15.147	20.95
2	MAJU	0.814	2.877	9.121	14.495	18.784	28.339	36.156	42.291	44.62
3	BERKEMBANG	28.556	37.785	54.560	59.501	59.501	54.017	48.480	40.879	33.65
4	TERTINGGAL	59.555	51.683	33.388	23.670	19.273	14.441	8.198	1.683	0.76
5	SANGAT TERTINGGAL	11.075	7.600	2.823	1.683	1.412	0.923	0.000	0.000	0.000
TOTAL		100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.1											
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*											
Tahun 2025											
Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2025**	**Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)**	**Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)**			**Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)**	**Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)**	**Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)**	
					Target Renja PD tahun n-2	**Realisasi Renja tahun n-2**	**Tingkat Realisasi % (t-n)**			**Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
			2025	**2022**	**2023**	**2023**	**2023**	**2024**	**2024**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10**	**11 = 5+7+10**	**12 = 11/4**
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2,12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**										

2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**64**	**60**	**62**	**60**	**60**	**64**	**70,30**	**199,3**	**311%**
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**SAKIP**	**75**		**73**	**71**	**71**	**75**	**75**	**146**	**195%**
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**100%**	4 dokumen	4 dokumen	13 dokumen	260%
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	**100%**	3 laporan	3 laporan	9 Laporan	225%
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2 laporan	4 laporan	4 laporan	**100%**	5 laporan	5 laporan	11 laporan	183%
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran**	**97,00**	**89,00**	**97,00**	**96,00**	**99%**	**97,00**	**97,00**	**282**	**291%**
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	64 orang/bulan	**89%**	64 orang/bulan	64 orang/bulan	200 orang	313%
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	600%

2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**100%**	3 Laporan	3 Laporan	10 Laporan	200%
2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**300%**
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	3 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	125%
2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasaan Masyarakat (customer/Stakeholder)**	**80,00**	**1 Laporan**	**78,00**	**80.77**	**80.77**	**78,00**	**78,00**	160,77	**201%**
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	-	-	2 paket	200%
2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**100%**	2 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	200%
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	-	-	1 Laporan	50%
2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	95 org, 6 kali	12 orang	160 Orang	160 orang	**100%**	95 org, 4 kali	95 org, 4 kali	552	97%

2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	95 org, 2 Kali	12 Orang	380 Orang	380 orang	**100%**	-	-	408	107%
2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	300%
2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	3 paket	100%
2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	1 paket	2 paket	2 paket	**100%**	3 paket	3 paket	6 paket	100%
2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	-	-	2 paket	50%
2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	4 paket	4 paket	4 paket	**100%**	4 paket	4 paket	12 paket	150%
2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	2 paket	2 paket	4 paket	100%

2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**100%**	10 Laporan	10 Laporan	9 Laporan	90%
2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**300%**
2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	-	2 unit	2 unit	100%	-	-	2 unit	67%
2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Paket	-	32 Paket	32 Paket	100,00%	2 Paket	2 Paket	34 Paket	106%
2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	86 Unit	86 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	110 Unit	5500%
2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	1 Unit	100%
2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	5 Laporan	125%
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	92%	12 laporan	12 laporan	35 Laporan	292%
2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**300%**

	Pemerintahan Daerah										
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 unit	18 unit	31 unit	92 unit	297%	53 unit	53 unit	163 unit	526%
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	44 Unit	2 unit	44 unit	44 unit	100%	33 Unit	33 Unit	79 unit	180%
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	1 Unit	1 Unit	4 unit	400%
2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	2 paket	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2.13.02	**Program Penataan Desa**	**Presentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar**	**3.257**	**7,546**	**3.257**	**2,389**	**0%**	**3.257**	**3.257**	**16,015**	**491,710 %**
2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**

2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 dokumen	-	-	0%	-	-	2 Dokumen	100%
2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	4 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	4 dokumen	100%
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	6 Dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	9 dokumen	150%
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	39 Unit	20 Unit	104 unit	104 unit	100%	24Unit	24Unit	148 unit	379%
2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa dan Kawasan Perdesaaan**	**0.380**	**1.249**	**1.629**	**0.651**	**#VALUE!**	**0.380**	**0.380**	**3,746**	**986%**
2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	-	-	4 Dokumen	100%

2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	8 Dokumen	4 Dokumen	-	-	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	75%
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen	5 Dokumen	7 dokumen	7 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	16 dokumen	267%
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang di Kelola secara Efektif dan Efisien**	**10,858**	**10,152**	**5,429**	**13,572**	**249,99%**	**10,858**	**10,858**	**43,431**	**400%**
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1 Laporan	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	11 dokumen	550%

2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang ditetapkan	4 Dokumen	4 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	-	-	0%
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dlm penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	5 dokumen	500%
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	0%	-	-	3 Dokumen	100%
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	0%	-	-	3 Dokumen	100%
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	-	-	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	2 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	21 dokumen	420%
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	11Dokumen	220%

2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	56 Org	97 org	56 org	56 org	100%	76 Org	76 Org	229 org	409%
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 org	-	-	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	6 Dokumen	-	-	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	77 Orang	-	-	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	275%

2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	350%
2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	-	6 Dokumen	100%
2.13.04.1.01.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	133%
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	-	6 Dokumen	600%
2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	24 Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**1,810**	**2,320**	**1,448**	**2,776**	**100%**	**1,810**	**1,810**	**9,186**	**508%**
2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	=	-	-	2 Dokumen	**100%**

2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	13 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	21 dokumen	420%
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	80 Lembaga	120 Lembaga	125 Lembaga	125 Lembaga	100%	275 Lembaga	275 Lembaga	520 Lembaga	650%
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40 unit	52 Unit	85 Unit	81 Unit	95%	66 unit	66 unit	199 Unit	498%

2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	9 dokumen	450%
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	9 dokumen	450%
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	100%
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	8 dokumen	267%
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Laporan	6 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	29 Laporan	363%
2.13.05.1.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-

2.13.05.1.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut: Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2025 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025).

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2024 dan Prakiraan Maju 2025-2026

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun					Tahun		Tahun		
				2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Desa (ID)	√	√	72,47	72,763	72,79	72,95	73,11	0.6978 (IDM)	0.7285 (IDM)	72,47	72,763	Pengukuran Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2021-2024 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), mulai tahun 2025 menggunakan Indeks Desa (ID)
2.	Presentase Desa Mandiri	√	√	23,78	24,05	24,32	24,59	24,59	7,166	15,147	23,78	24,05	
3.	Presentase Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat status	√	√	30,77	61,54	92,31	100	0	8,198	1,683	30,77	61,54	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh ketersedian SDM dan sarana prasarana serta pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana serta tidak terciptanya koordinasi, dan sinkronisasi yang baik akan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja.

- Kendala dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan Tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;

3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

- Tantangan dan Peluang

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat tantangan dan peluang yang berasal dari lingkungan ekseternal dan lingkungan internal yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah yang secara langsung berdampak bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan internal

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akanmendukung kelangsungan hidup organisasi.

Identifikasi faktor internal:

1. **Kekuatan**

   Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan srategis dalam mencapai visi dan misi. Adapun kekuatan yang dimiliki sebagai berikut:

   a. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   b. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
   c. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 2004 Nomor: 410/2917/SJ perihal Pengaturan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
   d. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juni 2005

Nomor: 410/1320/SJ perihal Institusi Pembina Penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah.

e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
f. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
g. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
h. Tersedianya kuantitas SDM.
i. Tersedianya Dana pada APBD.
j. Tersedianya Sarana yang memadai.

2. Kelemahan

Kelemahan adalah situasi dan factor-faktor luar organisasi yang bersifat negative, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.

Adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tupoksi yang masih tumpang tindih baik secara internal (antar bidang) maupun External (antar SKPD);
b. Database dan System Information Management masih lemah.
c. Terbatasnya Dana Operasional Kegiatan.
d. Kinerja aparat yang belum optimal.

e. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal.
f. Tenaga fungsional belum terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas.

Analisis lingkungan eksternal:

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factors) bagi sesuatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.

Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi disekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Pemahaman pada lingkungan eksternal akan memberikan masukan pemahaman pada organisasi mengenai kondisi dan situasi organisasi.

Peluang

a. Telah terbentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
b. Adanya Program-program Kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi.
c. Adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
d. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader - kader pemberdayaan masyarakat.
e. Adanya Kepedulian Masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan serta dukungan partisipasi masyarakat.
f. Partisipasi dan sumber daya alam di perdesaan.

Tantangan

a. Target pengentasan desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah belum tercapai.
b. Jumlah Desa Mandiri masih sangat rendah.
c. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup besar;
d. Luasnya wilayah perdesaan dan jumlah desa sasaran yang cukup banyak dalam pelaksanaan program kegiatan;
e. Masih rendahnya pemahaman Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap hakekat Pemberdayaan;
f. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Kelompok- kelompokmasyarakat dan Lembaga kemasyarakat di perdesaan;
g. Prasarana dan sarana perdesaan yang kurang memadahi;
h. Belum optimalnya Pelayanan publik pemerintahan Desa.
i. Keterpencilan lokasi desa, baik di kepulauan maupun di pegunungan.

Mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

a. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan prioritas pengentasan desa tertinggal, mengurangi jumlah desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.
b. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan

Pelaksanaan Dana Desa.

c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.

d. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

e. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

f. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

g. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

h. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target RENJA P E R U B A H A N DINAS PEEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 maka kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, selengkapnya kebutuhan program dan kegiatan dengan target dan pendanaan sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Perangkat Daerah		**: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah**									
Periode / Tahun		**: 2025**									
No.	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**Rp 6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Rp 11**	**12**
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**Rp 23.544.770.000**					**Rp 23.544.770.000**	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**71,00**	**Rp 16.788.490.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**71,00**	**Rp 16.200.290.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**83,00**	**Rp 834.954.370**	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**83,00**	**Rp 380.000.000**	
			Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah					**Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah**			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	9 dokumen	Rp 200.003.280	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	9 dokumen	Rp 50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 50.000.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Rp 384.951.090	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Rp 280.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Provinsi**	**Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP**	**100%**	**Rp 11.976.365.780**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP**	**100%**	**Rp 11.250.000.000**	
			Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	**97%**				**Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah**	**97%**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	64 Orang	Rp 9.802.365.780	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	64 Orang	Rp 9.825.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Kegiatan	Rp 2.054.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Kegiatan	Rp 1.285.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	13 Laporan	Rp 120.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	13 Laporan	Rp 140.000.000	

			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Provinsi dan Kab**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**Rp 200.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Provinsi dan Kab**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**Rp 180.000.000**	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**1 Dokumen**				**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Provinsi dan Kab	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp 200.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Provinsi dan Kab	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp 180.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Provinsi**	**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**	**100,00**	**Rp 920.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**	**100,00**	**Rp 754.000.000**	
	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Rp 220.000.000	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Rp 84.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	5 Dokumen	Rp 200.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	5 Dokumen	Rp 120.000.000	

			Penilaian Kinerja Pegawai					Penilaian Kinerja Pegawai			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	Rp 200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	Rp 210.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 orang	Rp 100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 orang	Rp 140.000.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	380 orang	Rp 200.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 orang	Rp 200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah**		**Rp 1.030.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah**		**Rp 1.230.000.000**	

			Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah					**Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah**			
			Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI					**Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI**			
			Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah					**Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah**			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 100.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 100.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp 300.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp 300.000.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Rp 100.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	-	

	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 100.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 60.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 110.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp 50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 320.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 720.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Provinsi**	**Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE**	**90**	**Rp 825.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Provinsi**	**Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE**	**90**	**Rp 820.000.000**	
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1 Laporan**				**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	2 unit	Rp 400.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	2 unit	Rp 500.000.000	

			Lapangan yang Disediakan					Lapangan yang Disediakan			
	Pengadaan mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 set	Rp 200.000.000	Pengadaan mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 set	Rp 120.000.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86 unit, 2 paket	Rp 200.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86 unit, 2 paket	Rp 200.000.000	
	Pengadaan aset tetap lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 paket	Rp 25.000.000	Pengadaan aset tetap lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 paket	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Provinsi**	**Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**	**100**	**Rp 260.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Provinsi**	**Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**	**100**	**Rp 420.000.000**	
			Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	**86,33**				**Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi**	**86,33**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Rp 10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	-	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	Rp 250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	Rp 420.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Provinsi**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**1 Dokumen**	**Rp 742.169.850**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Provinsi**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**1 Dokumen**	**Rp 1.166.290.000**	
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1 Laporan**				**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 Laporan**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	92 unit	Rp 180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	92 unit	Rp 200.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	Rp 100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	Rp 320.000.000	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp 100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Rp 362.169.850	Pemeliharaan/Rehabi-litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Rp 646.290.000	
		Provinsi dan 12 Kab	**Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)**	**0.27 (ID)**			**Provinsi dan 12 Kab**	**Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)**	**0.27 (ID)**		
	Program Penataan Desa	**12 Kab**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**		**Rp 1.802.350.000**	**Program Penataan Desa**	**12 Kab**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**		**Rp 1.070.000.000**	
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	**12 Kab**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**		**Rp 1.802.350.000**	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**12 Kab**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**		**Rp 1.070.000.000**	

	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Rp 110.000.000	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	-	Rp 110.000.000	
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2 Dokumen	Rp 220.000.000	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	-	Rp 240.000.000	
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 Dokumen	Rp 220.000.000	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang terdampingi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi	37 Desa/2 Kab	Rp 240.000.000	
								Jumlah usulan Pemekaran Desa yang terdampingi	2 Desa		
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan		Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan	40 Unit	Rp 1.252.350.000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan		Jumlah prasarana dan sarana pelayanan Pemerintahan	29 Unit	Rp 480.000.000	

	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa		Desa yang terpenuhi			
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	**12 Kab**	**Nilai dimensi Ekonomi**		**Rp 230.480.000**	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**12 Kab**	**Nilai dimensi Ekonomi**		**Rp 230.480.000**	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	**12 Kab**	**Nilai sub Dimensi Produksi Desa**		**Rp 230.480.000**	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**12 Kab**	**Nilai sub Dimensi Produksi Desa**		**Rp 230.480.000**	
			Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi					**Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi**			
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp 75.000.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Desa yang terdampingi dalam kerjasama antar desa dan Kabupaten/Kota	25 Desa	Rp 75.000.000	
	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Rp 75.000.000	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Kab	Jumlah desa yang mengikuti bimbingan teknis kerjasama antara desa dan pihak ketiga	28 Desa	Rp 75.000.000	

	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PembangunanKawasan Perdesaan	4 Dokumen	Rp 80.480.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	Jumlah BUMDesma yang terdampingi dalam peningkatan Potensi produk unggulan desa	16 BUMDesma	Rp 80.480.000	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**12 Kab**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**		**Rp 875.820.000**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**12 Kab**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**		**Rp 2.240.000.000**	
			Nilai dimensi Ekonomi					**Nilai dimensi Ekonomi**			
			Nilai dimensi lingkungan					**Nilai dimensi lingkungan**			
			Nilai dimensi Aksebilitas					**Nilai dimensi Aksebilitas**			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**12 Kab**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**		**Rp 875.820.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**12 Kab**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**		**Rp 2.240.000.000**	
			Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi					**Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi**			

			Nilai sub dimensi pengelolaan lingkungan					**Nilai sub dimensi pengelolaan lingkungan**			
			Nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan					**Nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan**			
			Nilai sub dimensi Kemudahan Akses					**Nilai sub dimensi Kemudahan Akses**			
			Nilai Sub Dimensi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)					**Nilai Sub Dimensi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)**			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	2 Dokumen	Rp 20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen	-	
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	Rp 50.000.000	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang meningkat kapasitasnya	52 orang	Rp 160.000.000	

								Jumlah Terselenggaranya pelaksanaan PILKADES di Kabupaten	12 Kab.		
								Jumlah Desa yang dapat mengaplikasikan Pelayanan Berbasis Digital	20 Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	2 Dokumen	Rp 20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	2 Dokumen	Rp 50.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	Rp 50.000.000	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	Jumlah Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	28 Desa	Rp 160.000.000	
								Jumlah Desa yang memmanfaatkan Data Registrasi Sosial (REGSOSEK)	20 Desa		

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	Rp 50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	Rp 50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	
	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	Rp 20.000.000	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	Rp 64.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah desa dan kelurahan yang terevaluasi dalam perkembangan desa dan kelurahan (Epdeskel)	12 Desa / 13 Kel	Rp 520.000.000	
								Jumlah Desa dan Kelurahan yang memenuhi tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa / 13 Kel		

	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	Rp 69.820.000	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	100 orang	Rp 160.000.000	
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	12 Kab	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	76 Orang	Rp 80.000.000	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang mengikuti Bimtek Percontohan Desa Anti Korupsi	36 orang	Rp 140.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 Orang	Rp 50.000.000	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	1 Dokumen	Rp 50.000.000	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana	2 BUMDes	Rp 200.000.000	

	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	Rp 24.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	12 Kab	Jumlah Kabupaten yang terdampingi dalam Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Kab	Rp 100.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	1 Dokumen	Rp 24.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	-	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4 Dokumen	Rp 50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	12 Kab	Jumlah BUMDES yang terbina dalam Peningkatan Kapasitas	36 BUMDesa	Rp 300.000.000	
								Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan	2 BUMDes		

								sarana dan prasarana			
								Jumlah Bumdes yang terbimbing dalam peningkatan status	5 BUMDes		
								Jumlah Bumdes yang termonitoring	4 BUMDes		
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	Rp 40.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kab	Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa	74 orang/Desa	Rp 140.000.000	
								Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya	4 Desa		
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp 24.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	

	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 40.000.000	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	-	-	
	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp 40.000.000	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah BPD yang Meningkat Kapasitasnya	70 BPD	Rp 100.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	1 Dokumen	Rp 20.000.000	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	-	Rp 150.000.000	
	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Dokumen	Rp 20.000.000	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	Jumlah kabupaten yang terdampingi dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	2 Kab	Rp 60.000.000	

	Fasilitasi Penetapan Kewenangangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 20.000.000	Fasilitasi Penetapan Kewenangangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	-	-	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**12 Kab**	**Nilai dimensi layanan dasar**		**Rp 3.847.630.000**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**12 Kab**	**Nilai dimensi layanan dasar**		**Rp 3.804.000.000**	
			Nilai dimensi Sosial					**Nilai dimensi Sosial**			
			Nilai dimensi Ekonomi					**Nilai dimensi Ekonomi**			
			Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa					**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**			

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Kab	**Nilai Sub dimensi Pendidikan**		**Rp 3.847.630.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	12 Kab	**Nilai Sub dimensi Pendidikan**		**Rp 3.804.000.000**	
			Nilai Sub dimensi Kesehatan					**Nilai Sub dimensi Kesehatan**			
			Nilai Sub Dimensi Utilitas Dasar					**Nilai Sub Dimensi Utilitas Dasar**			
			Nilai sub Dimensi Produksi Desa					**Nilai sub Dimensi Produksi Desa**			
			Nilai sub dimensi kelembagaan					**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**			

			dan pelayanan Desa								
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	Rp 150.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	Rp 150.000.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen'	Rp 250.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah LKD, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang dibina dalam penataan kelembagaan	110 LKD/LA	Rp 400.000.000	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	275 Lembaga	Rp 250.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Pengurus LKD, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	170 Lembaga	Rp 400.000.000	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	Rp 897.255.475	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	108 Unit	Rp 614.000.000	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	Rp 310.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kab	Jumlah masyarakat yang terbimbing dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat	60 orang	Rp 500.000.000	
								Jumlah Bumdes yang memperoleh sarana pengembangan Usaha ekonomi kreatif masyarakat	2 BUMDes		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Dokumen	Rp 250.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	Jumlah posyantek yang mengikuti Bimtek Pengembangan Kapasitas Posyantek dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15 Posyantek	Rp 500.000.000	
								Jumlah posyantek yang mempeeroleh sarana penerapan dan pemanfaatan Teknolgi Tepat Guna untuk	2 Posyantek		

								potensi produk unggulan desa			
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Rp 250.000.000	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong		Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai gotong royong	80 orang	Rp 100.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2 Dokumen	Rp 240.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	12 Kab	Jumlah peralatan Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)yang disediakan	164 buah/2 Kab	Rp 240.000.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Laporan	Rp 1.100.374.525	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	Jumlah Hasil Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	50 TP PKK	Rp 700.000.000	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Kab	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Kab	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	Rp 100.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	12 Kab	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	12 Kab	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	1 Dokumen	Rp 100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, maka melalui Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilakukan upaya konkrit untuk menjawab isu- isu strategis tersebut yaitu dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari pemangku jabatan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023					
Perangkat Daerah		: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah			
Periode / Tahun		: 2025			
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENATAAN DESA		**Presentase Kelembagaan Desa yang ditata Sesuai Standar**		
	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		**Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Rp 2.528.814.328	
		- Desa Baya, Kab. Banggai			
		- Desa Mekar sari, Kab. Banggai			
		- Desa Biak Kec. Luwuk Utara Kabupaten Banggai			
		- Desa Porame Kab Sigi, Kab. Sigi			
		- Desa Guntarano Kab Donggala			
		- Desa Jono Kab Sigi			
		- Desa Bale Kab Sigi			
		- Desa Puro''o Kab Sigi			

		- Desa Barati Kec. Pamona Tenggara kab. Poso			
		- Desa Toraranga Kec. Siniu Kab. Parimo			
		- Desa Lembah Bomban Kec. Bolano , Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Karya Agung Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parimo			
		- Desa Tolole Kec. Ampibabo Kab. Parimo			
		- Desa dusunan barat Kec. Tinombo Kab. Parimo			
		- Desa Tada Kec. Tinombo Selatan Kab. Parimo			
		- Desa Petak, Kab. Banggai			
		- Desa Kayu Agung, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Korompeeli, Kab. Morowali Utara			
		- Desa Tomata, Kab. Morowali Utara			
		- Desa Maliwuko, Kab. Poso			
		- Desa Tinompo, Kab. Morowali Utara			
		- Desa AWu, Kab. Banggai			
		- Desa pusungi, Kab. Tojo Una Una			
		- Desa patingko, Kab. Tojo Una Una			
		- Desa uemakuni, Kab. Tojo Una Una			
		- Desa Tumpapa Indah Kec Balinggi Kab Parimo			
		- Desa Tibu Kec. Tinombo Kab Parimo			
		- Desa Kasimbar Kec Kasimbar Kab Parimo			
		- Desa Petunagusi Kec Bolano Lambunu Kab Parimo			
		- Desa Wanamukti Barat Kec Bolano Kab Parimo			
		- Desa Bahomoahi Kec. Bungku Timur Kab. Morowali			
		- Desa Wanagading Kec Bolana Lambunu Kab Parimo			
		- Desa Sidoan Selatan Kec. Sidoan Kab. Parimo			
		- Desa Silanga Kec. Sidiu Kab. Parimo			
		- Desa Sritabaang Kec Bolano Kab Parimo			
		- Desa Toraranga Kec Siniu Kab Parimo			
		- Desa Kayu Agung Kec Mepanga Kab Parimo			
		- Desa ogotumubu barat, kec. Tomini kab. Parigi moutong			

	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang di Kelola secara Efektif dan Efisien**		
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**		
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan BUMDesa Kab/Kota dan Lembaga Kerjasama Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp 879.257.187	
		- Desa Pandayora Kec Pamona Selatan Kab Poso			
		- Kabupaten Donggala			
		- Kabupaten Poso			
		- Kabupaten Tojo Una-Una			
		- Desa Beringin Jaya Kec Bolano Kab Parimo			
		- Desa Leboni Kec Pamona Pusalemba Kab Poso			
		- Desa Tamandue Kec Lore Timur Kab Poso			
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**		
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten**		

	Sub Kegiatan :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 3.587.500.000	
		- Desa Langaleso Kec. Dolo Kab Sigi			
		- Kelurahan Taipa Kota Palu			
		- Desa Sarombaya Kab Donggala			
		- Desa Sejahtera Kab Sigi			
		- Kelurahan Baru, Kab. Toli Toli			
		- Kelurahan Pengawu Kec Tatanga			
		- Kelurahan Buluri Kec Ulujadi			
		- Kelurahan Talise Kota Palu			
		- Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu			
		- Kelurahan lolu Utara Kota Palu			
		- Kelurahan Tipo Kota Palu			
		- Kelurahan Watusampu			
		- Kelurahan Palupi			
		- Kelurahan Balaroa			
		- Kelurahan Lere			
		- Kelurahan Ujuna			
		- Desa Donggulu, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Maninili, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Gio Timur, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Sidomukti, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Bukit Makmur, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Kotanagaya, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Petunasugi, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Wanamukti Barat, Kab. Parigi Moutong			

		- Desa Taopa, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Kotanagaya Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Sumber Agung Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Tinombala Barat Kab. Parigi Moutong			
		- Desa mamulusan Kab. Banggai Kepulauan			
		- Desa Toiba Kab. Banggai			
		- Desa Bone bae, Kab. Banggai			
		- Kelurahan Birobuli Selatan, Kota Palu			
		- Kelurahan Birobuli Selatan			
		- Kelurahan Palupi, Kota Palu			
		- Kelurahan Duyu, Kota Palu			
		- Kelurahan Lere, Kota Palu			
		- Desa Tomini Kec Tomini Kab Parimo			
		- Kelurahan Talise Kota Palu			
		- Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur			
		- Kec Bolano Kab Parigi Moutong			
		- Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah			
		- Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu			
		- Kel. Lambara, Kec. Tawaeli, Kota Palu			
		- Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol			
		- Desa Sibaluton Kec Basidondo Kab. Tolitoli			
		- Kel. Pantoloan Boya Kec Tawaeli			
		- Kelurahan Kilongan Permai Kec Luwuk Utara			
		- Desa Tindaki, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Binangga, Kec Parigi Tengah, Kab Parigi Moutong			
		- Desa Lanumor Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara			
		- Kelurahan Salakan Kec Tinangkung Kab Banggai Kepulauan			
		- Kelurahan Nunu Kec Tatanga			
		- Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu			
		- Desa Cendana Putra Kec. Toili Kabupaten Banggai			
		- Desa Dwipakarya Kec. Simpang Raya			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah, selanjutnya kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termuat pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 point g pada urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan Pemerintah dalam berbagai cara diantaranya dengan menempatkan desa sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini didasari pemahaman bahwa desa memiliki posisi sangat strategis dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana desa memiliki peran sebagai pendorong tumbuhnya potensi-potensi lokal desa di berbagai bidang yang ada. Selanjutnya untuk memposisikan desa sebagai motor penggerak utama pembangunan di desa maka Pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan peran yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa. Desa yang pada beberapa dekade hanya menjadi obyek pembangunan, maka dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut menjadikan desa memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang mampu mendorong bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan aturan pemberian insentif/penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih fokus bekerja dalam melayani masyarakatnya.

Melalui Undang-undang Desa terbuka ruang yang luas bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang- undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga

memungkinkan desa untuk terbuka sehingga berkembang lebih pesat secara bersama.

Sejak beberapa dekade Pemerintahan Indonesia, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, namun dalam pelaksanaannya tetap diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang- Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum.

Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar- benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Dalam menjaga sinergitas pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan

pemerintah daerah. Adapun kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien.
2. Berkembangnya status Pembangunan Desa.
3. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagai Lembaga Teknis yang bertugas membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dalam Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dirumuskan arah kebijakan guna pencapaian tujuan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penguatan penataan kelembagaan desa guna penataan desa sesuai standar.
2. Fasilitasi penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Fasilitasi penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan yang didukung oleh Lembaga Ekonomi Masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana serta Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Fasilitasi penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai aktor perubahan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian adat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tujuan Pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah **"Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa"** dengan indikator Tujuan **"Indeks Desa Mandiri (Indeks), Presentase Desa Mandiri (%), dan Presentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang meningkat status Desanya(Presentase)"**.

Adapun Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai adalah " **Meningkatnya Kemandirian Desa (Indeks Desa)** dengan indikator **"Persentase Desa Mandiri (%), dan Presentase Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang meningkat status Desanya(Presentase)"**.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator serta target untuk pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatnya Kemandirian Desa (Indeks Desa)	- Indeks Desa - Presentase Desa Mandiri - Presentase Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat status desanya	%	- 27,47 - 23,78 - 30,77

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- **Visi Misi**

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029, bahwa visi pembangunan daerah adalah **Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029**, sedangkan Misi Pembangunan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja;
2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yangtangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal;

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pelaksanaan 2 (dua) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalan upaya pencapaian visi Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029, yaitu :

1. **Misi ke-1, Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja;**
2. **Misi ke-2, Mewujudkan Masyarakat Bahagia Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Keadilan**.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat dan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksessibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat desa dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan melalui pengaturan dan pengendalian yang prosesnya sistematis dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat di perdesaan mampu mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembangunan di desa yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin, baik yang bermukim di perkotaan maupun perdesaan, dimana melalui proses pemberdayaan diharapkan masyarakat miskin lebih mampu dan berdaya dalam aktivitas kehidupannya melalui pemanfaatan potensi SDM dan SDA yang ada.

Kemiskinan adalah keadaan yang terjadi pada seseorang dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan atau dengan kata lain kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan yang merupakan masalah global hampir semua negara berkembang dalam penyelesaian masalahanya memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak, bukan hanya pemerintah tetapi pihak swasta dan masyarakat untuk sama-sama bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan yang ada.

Berdasarkan DTKS 2020 (KEPMENSOS No. 146/HUK/2020) per Oktober 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 1.254.583 jiwa, Rumah Tangga Miksin (RTM) berjumlah 323.842 RTM atau 41,99%. Sebagai OPD pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui 5 strategi yaitu:

1. Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan.
4. Penciptaan lapangan kerja.
5. Fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaaan /BUMDesa.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya– upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database penduduk miskin (DTKS) dari TNP2K, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kelurahan, serta kemauan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadi faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat miskin.

- **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terdapat 5 Program yaitu Progam Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi, dan 4 Program strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan rincian Kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai berikut:

(1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Bidang Sekretariat yakni Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkatdaerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
4. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkaopannya;
   - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

6. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pengadaan Mebel;
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pengadaan Aset Tetap Lainnya;

7. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan:
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Dengan Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(2). Program Penataan Desa

Program ini menunjang Terselenggaranya Kegiatan Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa dan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan terdiri dari:

- Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat.
- Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa.
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa.

(3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi, adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

(4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Adapun Sub

Kegiatan yang Dilaksanakan terdiri dari;

- Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
- Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan;
- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
- Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa.

- Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa.
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.
- Fasilitasi Pencatatan Datadan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa.
- Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa.
- Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dabn Desa Adat di Kabupaten/Kota.

(5) **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini menunjang Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota, adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarkat Hukum Adat;

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perilindungan Masyarakat Desa;
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah akan dilaksanakan di 12 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Penyebaran Lokasi dan analisis kebutuhan dana dapat dilihat pada tabel berikiut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah		**: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah**							
Periode / Tahun		**: 2025**							
Prakiraan Maju		**: 2026**							
Kode	**Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan**	**Indikator Program / Kegiatan**	**Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026**	
			Lokasi	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2,12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**Rp 27.425.704.598**	**DAU**			**Rp 38.028.200.000**

2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Provinsi dan 12 Kab**		**Rp 12.070.013.579**	**DAU**			**Rp. 13.661.807.432**
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**SAKIP**	**Provinsi dan 12 Kab**		**Rp. 136.147.650**	**DAU**			**Rp. 307.640.000**
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	5 dokumen	Rp. 14.865.000	DAU		7 dokumen	Rp. 36.900.000
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan 12 Kab	4 Laporan	Rp. 9.675.000	DAU		3 laporan	Rp. 20.740.000
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	6 Laporan	Rp. 111.607.650	DAU		2 Laporan	Rp. 250.000.000
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran**	**Provinsi**	**97**	**Rp. 10.733.370.661**	**DAU**		**97**	**Rp. 10.997.410.050**

2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	64 orang/bulan	Rp. 9.625.343.861	DAU		72 orang/bulan	Rp. 9.792.060.000
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	1 Dokumen	Rp. 1.061.700.000	DAU		1 Dokumen	Rp. 1.125.350.000
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	5 Laporan	Rp. 46.326.800	DAU		3 Laporan	Rp. 80.000.050
2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**Provinsi dan Kab**	**1 Dokumen**	**Rp 56.605.600**	**DAU**		**1 Dokumen**	**Rp. 120.000.200**
		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		**1 Laporan**	**Rp 56.605.600**			**1 Laporan**	**Rp. 120.000.200**
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Provinsi dan Kab	4 Laporan	**Rp 56.605.600**	DAU		1 Laporan	**Rp. 120.000.200**

2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (customer /Stakeholder)**	**Provinsi**	**90**	**Rp 197.444.700**	**DAU**		**92**	**Rp. 284.000.650**
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi	1 paket	-	DAU		1 paket	-
2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	4 Laporan	Rp. 32.960.000	DAU		1 Laporan	Rp. 50.000.050
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	2 Laporan	Rp. 44.545.000	DAU		1 Laporan	Rp. 64.000.250
2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	95 org, 6 kali	Rp. 50.050.000	DAU		16 orang, 3 kali	Rp. 120.000.200
2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi dan 12 Kab	95 org, 2 Kali	Rp. 69.889.700	DAU		10 orang, 2 kali	Rp. 50.000.150

2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**Provinsi dan 12 Kab**	**1 Dokumen**	**Rp 321.205.400**	**DAU**		**1 Dokumen**	**Rp. 762.871.770**
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		**1 Laporan**				**1 Laporan**	**Rp. 762.871.770**
2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi	3 paket		DAU		1 paket	Rp. 30.000.000
2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi	6 paket	Rp. 77.826.300	DAU		2 paket	Rp. 123.548.970
2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi	4 paket		DAU		1 paket	-
2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi	8 paket	Rp. 25.000.000	DAU		4 paket	Rp. 50.000.000
2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi	4 paket		DAU		1 paket	Rp. 30.000.000

2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	4 Laporan	Rp. 218.379.100	DAU		3 Laporan	Rp. 529.322.800
2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Provinsi**	**1 Dokumen**		**DAU**		**1 Dokumen**	**Rp. 362.002.502**
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**1 Laporan**				**1 Laporan**	**Rp. 362.002.502**
2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi	3 unit		DAU		2 Unit	-
2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi	32 Paket		DAU		10 Paket	Rp. 68.387.000
2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi	2 Unit		DAU		2 Unit	Rp. 293.615.502

2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Provinsi	1 paket				1 paket	-
2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Provinsi**	**1 Laporan**	Rp. 288.351.568	**DAU**		**1 Laporan**	**Rp. 328.532.260**
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	4 Laporan		DAU		4 Laporan	-
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi	12 laporan	Rp. 288.351.568	DAU		12 bulan	**Rp. 328.532.260**
2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	Provinsi	**1 Dokumen**	**Rp 336.888.000**	**DAU**		**1 Dokumen**	**Rp. 499.350.000**
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1 Laporan**	**Rp 336.888.000**			**1 Laporan**	**Rp. 499.350.000**

2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi	31 unit	Rp. 149.350.000	DAU		18 unit	Rp. 181.350.000
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Provinsi	44 Unit	Rp. 187.538.000	DAU		2 unit	Rp. 218.000.000
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi	1 Unit		DAU		1 unit	Rp. 100.000.000
2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	2 paket		DAU		2 paket	-
2.13.02	**Program Penataan Desa**	**Presentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa Sesuai Standar**	**12 Kab**		**Rp. 3.572.485.350**	**DAU**			**Rp. 3.050.700.200**

2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**12 Kab**	**1 Laporan**	**Rp. 3.572.485.350**			**1 Laporan**	**Rp. 3.050.700.200**
2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	12 Kab	2 Dokumen		DAU		2 Dokumen	-
2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kab	4 Dokumen		DAU		2 Dokumen	-
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	12 Kab	6 Dokumen	Rp. 46.191.650	DAU		2 Dokumen	Rp. 100.000.200

2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	12 Kab	39 Unit	Rp. 3.526.293.700	DAU		20 unit	Rp. 2.950.700.000
2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Presentase peningkatan perkembangan Desa melalui kerjasama desa**	**12 Kab**	**1,629**	**Rp 135.315.450**	**DAU**		**1,629**	**Rp 479.849.850**
2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Terfasilitasniya Kerjasama Antar Desa yang menjadi kewenangan Provinsi**	12 Kab	**1 Laporan**	**Rp 135.315.450**	DAU		**1 Laporan**	**Rp 479.849.850**
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	4 Dokumen	Rp. 44.913.900	DAU		10 Dokumen	89.924.925
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	12 Kab	8 Dokumen	Rp. 30.573.450	DAU		10 Dokumen	89.924.925

2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	6 Dokumen	Rp. 59.828.100	DAU		10 Dokumen	300.000.000
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien**	**12 Kab**		**Rp. 741.920.850**	**DAU**			**5.057.001.050**
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**12 Kab**	**1 Laporan**	**Rp. 741.920.850**	**DAU**		**1 Laporan**	**Rp 1.032.200.000**
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	12 Kab	5 Dokumen		DAU		5 Dokumen	-

2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	2 Dokumen	Rp. 45.139.900	DAU		4 Dokumen	90.000.100
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	12 Kab	4 Dokumen		DAU		5 Dokumen	-
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	1 Dokumen	Rp. 36.365.350	DAU		4 Dokumen	100.000.200
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	3 Dokumen		DAU		3 Dokumen	-
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Kab	3 Dokumen		DAU		3 Dokumen	-

2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	12 Kab		DAU		12 Kab	-
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kab	5 Dokumen	Rp. 97.571.200	DAU		3 Dokumen	200.000.200
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	5 Dokumen	Rp. 35.203.200	DAU		3 Dokumen	80.000.250
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	12 Kab	56 Org	Rp. 107.489.600	DAU		100 org	250.000.050
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	12 Kab	40 org		DAU		40 org	-

2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	6 Dokumen	Rp. 93.741.600	DAU		6 Dokumen	2.482.000.000
2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Kab	77 Orang	Rp. 24.713.250	DAU		6 Dokumen	85.000.000
2.13.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	12 Kab	6 Dokumen		DAU		6 Dokumen	-
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12 Kab	4 Dokumen	Rp. 181.880.250	DAU		2 Dokumen	1.550.000.000

2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kab	2 Dokumen	Rp. 42.766.700	DAU		2 Dokumen	100.000.150
2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	6 Dokumen		DAU		6 Dokumen	-
2.13.04.1.01.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kab	3 Dokumen		DAU		3 Dokumen	-
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	1 Dokumen	Rp. 30.481.550	DAU		1 Dokumen	70.000.100
2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	12 Kab	24 Desa		DAU		24 Desa	-

2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	1 Laporan	Rp. 46.568.250	DAU		1 Laporan	50.000.000
2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	12 Kab	2 Dokumen		DAU		2 Dokumen	-
2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**12 Kab**		**Rp. 10.905.969.369**	**DAU**			**Rp. 15.778.841.468**

2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten**	12 Kab	**1 Laporan**	**Rp. 10.905.969.369**	DAU		**1 Laporan**	**Rp. 15.778.841.468**
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	2 Dokumen		DAU		2 Dokumen	-
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	5 Dokumen	Rp. 185.323.960	DAU		13 Dokumen	80.000.300

2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	12 Kab	80 Lembaga	Rp. 97.116.500	DAU		120 Lembaga	395.400.400
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	40 unit	Rp 9.672.874.100	DAU		40 unit	Rp 13.803.440.000
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kab	2 Dokumen	Rp. 65.289.900	DAU		2 Dokumen	Rp. 400.000.000

2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	2 Dokumen	Rp. 142.412.625	DAU		2 Dokumen	Rp. 250.000.200
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan BhaktiGotong Royong Masyarakat	12 Kab	3 Laporan	Rp. 24.940.200	DAU		1 Laporan	Rp. 50.000.300
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	12 Kab	3 Dokumen	Rp. 25.000.084	DAU		3 Dokumen	Rp. 50.000.268
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	8 Laporan	Rp. 693.012.000	DAU		5 Laporan	Rp. 750.000.000

2.13.05.1.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Kab	50 Keluarga		DAU		50 Keluarga	-
2.13.05.1.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	12 Kab	50 Keluarga		DAU		50 Keluarga	-

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025, disusun dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan mendukung pencapaian Visi, Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 pada yaitu Misi ke-2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM dan Misi ke-3 Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatkan Perkembangan Desa menuju Pembangunan yang Berkelanjutan adalah 5 Program, 8 Kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi, 4 kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, 27 sub kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi dan 40 sub kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan rincian program prioritas sebagai berikut:

(1) Program Penataan Desa

(2) Program Peningkatan Kerjasama Desa

(2) Program Administrasi Pemerintahan Desa

(4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Periode 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2,12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**Rp 27,425,704,598**		

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	**Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**70,30**	**71,00**	**Rp 12.070,013,579**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan 12 Kab**
	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,45**	**83,00**	**Rp 136,147,650**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan 12 Kab**
				Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah					
		2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	Rp 14,865,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Rp 9,675,000	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab

		2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	Rp 111,607,650	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP)	2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP**	**100%**	**100%**	**Rp 10.733.370.661**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**
	Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu			**Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah**	**93,98**	**97%**			
		2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/ 12 bulan	64 Orang	Rp 9.625.343.861	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Kegiatan	Rp 1.061.700.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi

		2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Rp 46.326.800	Dinas PMD Prov.	Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**Rp 56.605.600**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan Kab**
				Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**			
		2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Rp 56.605.600	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan Kab
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**			**Rp 197.444.700**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**
		2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi

		2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 32.960.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	1 Laporan	Rp 44.545.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 orang	160 orang	Rp 50.050.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	380 orang	300 orang	Rp 69.889.700	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah**			**Rp 321.205.400**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan 12 Kab**

	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal			**Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah**					
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)			**Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI**					
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah			**Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah**					
		2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	Rp 77.826.300	Dinas PMD Prov.	Provinsi

		2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	Rp 25.000.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp 218.379.100	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE**	**80**	**90**	**Rp -**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**

				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**			
		2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	2 unit		Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 set	32 set	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86 unit, 2 paket	86 unit, 2 paket	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**	**Nilai**	**100**	**Rp 288.351.568**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**

				Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	**86,33**	**86,33**			
		2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan	Rp 288.351.568	Dinas PMD Prov.	Provinsi
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**Rp 336.888.000**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**			
		2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	92 unit	92 unit	Rp 149.350.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi

		2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	Rp 187.538.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
Meningkatnya pemerataan pembangunan wilayah pedesaan	**Meningkatnya Kemandirian Desa**			**Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)**	**0,27%**	**0.27 (ID)**		**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan 12 Kab**
	Meningkatnya nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.02	**Program Penataan Desa**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**			**Rp 3.572.485.350**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**			**Rp 3.572.485.350**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**

		2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Desa yang terdampingi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi	30 Desa	37 Desa/2 Kab	Rp 46.191.650	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah usulan Pemekaran Desa yang terdampingi	2 Desa	2 Desa			
		2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan Pemerintahan Desa yang terpenuhi	26 Unit	Unit	Rp 3.526.293.700		

	Meningkatnya nilai dimensi Ekonomi	2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Nilai dimensi Ekonomi**			**Rp 135.315.450**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya sub dimensi Produksi Desa	2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Nilai sub Dimensi Produksi Desa**			**Rp 135.315.450**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi			**Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi**					
		2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang terdampingi dalam kerjasama antar desa dan Kabupaten/Kota	-	25 Desa	Rp 44.913.900	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang mengikuti bimbingan teknis kerjasama antara desa dan pihak ketiga	2 Dokumen	28 Desa	Rp 30.573.450	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah BUMDesma yang terdampingi dalam peningkatan Potensi produk unggulan desa	40 BUMDesma	16 BUMDesma	Rp 59.828.100	Dinas PMD Prov.	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali

	Meningkatnya nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**			**Rp 741.920.850**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya nilai dimensi Ekonomi			**Nilai dimensi Ekonomi**					
	Meningkatnya nilai dimensi Lingkungan			**Nilai dimensi lingkungan**					
	Meningkatnya nilai dimensi Aksebilitas			**Nilai dimensi Aksebilitas**					
	Meningkatnya sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**			**Rp 741.920.8500**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi			**Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi**					
	Meningkatnya nilai sub dimensi pengelolaan lingkungan			**Nilai sub dimensi pengelolaan lingkungan**					

	Meningkatnya nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan			**Nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan**					
	Meningkatnya nilai sub dimensi Kondisi Kemudahan Akses			**Nilai sub dimensi Kemudahan Akses**					
	Meningkatnya Sub Dimensi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)			**Nilai Sub Dimensi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)**					
		2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang meningkat kapasitasnya	30 orang	52 orang	Rp 45.139.900	Dinas PMD Prov.	12 Kab

				Jumlah Terselenggaranya pelaksanaan PILKADES di Kabupaten	-	12 Kab.			
				Jumlah Desa yang dapat mengaplikasikan Pelayanan Berbasis Digital	-	20 Desa			
		2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	30 Desa	28 Desa	Rp 36.365.350	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Desa yang memmanfaatkan Data Registrasi Sosial (REGSOSEK)	-	20 Desa			

		2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang terevaluasi dalam perkembangan desa dan kelurahan (Epdeskel)	12 Desa / 13 Kel	12 Desa / 13 Kel	Rp 97.571.200	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Desa dan Kelurahan yang memenuhi tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa / 13 Kel	12 Desa / 13 Kel			

		2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	100 orang	100 orang	Rp 35.203.200	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Bimtek Percontohan Desa Anti Korupsi	40 orang	36 orang	Rp 107.489.600	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	-	2 Desa	Rp 93.741.600	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0013	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Kabupaten yang terdampingi dalam Penyusunan Produk Hukum Desa	-	12 Kab	Rp 24.713.250	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah BUMDES yang terbina dalam Peningkatan Kapasitas	208 BUMDes	36 BUMDesa	Rp 181..880.250	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana	13 BUMDes	2 BUMDes			
				Jumlah Bumdes yang terbimbing dalam peningkatan status	-	5 BUMDes			
				Jumlah Bumdes yang termonitoring	6 BUMDesa	4 BUMDes			
		2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25 orang/Desa	74 orang/Desa	Rp 42.766.700	Dinas PMD Prov.	12 Kab

				Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya	4 Desa	4 Desa			
		2.13.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah BPD yang Meningkat Kapasitasnya	-	70 BPD	Rp 30.481.550	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0020	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah kabupaten yang terdampingi dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	2 Kab	2 Kab	**Rp 46.568.250**	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	-	-	Rp -		
	Meningkatnya nilai dimensi layanan dasar	2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Nilai dimensi layanan dasar**			**Rp 10.905.969.369**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya nilai dimensi Sosial			**Nilai dimensi Sosial**					
	Meningkatnya nilai dimensi Ekonomi			**Nilai dimensi Ekonomi**					
	Meningkatnya nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa			**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**					

	Meningkatnya Nilai Sub dimensi Pendidikan	2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Sub dimensi Pendidikan**			**Rp 10.905.969.369**	**Dinas PMD Prov.**	12 Kab
	Meningkatnya Nilai Sub dimensi Kesehatan			**Nilai Sub dimensi Kesehatan**					
	Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Utilitas Dasar			**Nilai Sub Dimensi Utilitas Dasar**					
	Meningkatnya sub dimensi Produksi Desa			**Nilai sub Dimensi Produksi Desa**					
	Meningkatnya sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa			**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**					

		2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	-		Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LKD, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang dibina dalam penataan kelembagaan	440 LKD/LA	110 LKD/LA	Rp 185.323.960	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus LKD, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	275 Lembaga	170 Lembaga	Rp 97.116.500	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	101 Unit	108 Unit	Rp 9.672.874.100	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah masyarakat yang terbimbing dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat	90 orang	60 orang	Rp 65.289.900	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Bumdes yang memperoleh sarana pengembangan Usaha ekonomi kreatif masyarakat	3 BUMDes	2 BUMDes			

		2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah posyantek yang mengikuti Bimtek Pengembangan Kapasitas Posyantek dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Posyantek	15 Posyantek	Rp 142.412.625	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah posyantek yang mempeeroleh sarana penerapan dan pemanfaatan Teknolgi Tepat Guna untuk potensi produk unggulan desa	2 Posyantek	2 Posyantek			
		2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai gotong royong	80 orang	80 orang	Rp 24.940.200		
		2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah peralatan Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)yang disediakan	164 buah/2 Kab	164 buah/2 Kab	Rp 25.000.084	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hasil Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	585 TP PKK	50 TP PKK	Rp 693.012.000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-		Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	-	-		Dinas PMD Prov.	12 Kab

BAB V
PENUTUP

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat desa dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan melalui pengaturan dan pengendalian yang prosesnya sistematis dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat di perdesaan mampu mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembangunan di desa yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Salah satu upaya memberdayakan masyarakat dan desa di Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan implementasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dituangkan dalam kinerja program,kegiatan dan sub kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara teknis dituangkan dalam Rencana Kerja perangkat daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan perangkat daerah terkait dengan lebih optimal dalam menciptakan Good Governance.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dimana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja diharapkan dapat melaksanakan Rencana Kerja Perubahan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya secara sistematis dan konsisten.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Organisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Kepala Bidang	Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan

4	Kasubag dan Kasubid	Penanggung Jawab Pelaksana Sub Kegiatan
5	Para JFU/Staf di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawes Tengah	Pelaksana Input dan Operasional Penyelenggara Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kerja

5.2 PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun sebagai pedoman yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur sebagai pelaksana kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 19 November 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 1986003 1 009